

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh:**

**TIKA ARISTY**

**B 200154020**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh :**

**TIKA ARISTY**

**B 200 154 020**

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



**Dr. Fatchan Achyani, S.E., M.Si**

**NIK/NIDN. 643/614086801**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi empiris Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)**

Oleh :

**TIKA ARISTY**

**B 200 154 020**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Pada hari Selasa, 06 Agustus 2019**

**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. **Dr. Fatchan Achyani, S.E., M.Si**

**(Ketua Dewan Penguji)**

2. **Dra. Rina Trisnawati M.Si, PhD., Ak, CA**

**(Anggota I Dewan Penguji)**

3. **Dra. Mujiyati M.Si**

**(Anggota II Dewan Penguji)**

(  )  
(  )  
(  )



**Dekan,**

**Dr. Syamsudin, M.M**

**NIDN. 0017025701**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan mempertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 06 Agustus 2019

Penulis



**Tika Aristy**

**B200154020**

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan proksi ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, belanja daerah, dan *leverage* pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2016. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2016 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 35 Kota/Kabupaten dengan periode waktu selama 2 tahun. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan ukuran pemerintah daerah dan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan belanja daerah dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** kinerja keuangan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, pendapatan antar pemerintah, pengeluaran daerah, leverage

**Abstract**

This study to analyze the influence of the characteristic of local governments on the financial performance of local governments by using proxy size of local government, *intergovernmental revenue*, regional expenditure, and leverage on district / cities in Central Java Province in 2015-2016. The population used in this study is the regional government in Central Java Province in 2015-2016 consisting of 29 Regencies and 6 Cities. The sampling technique uses purposive sampling method with a total sample of 35 cities/ regencies with a period of time of 2 years. Analysis of the data using multiple linear regression analysis. The results showed that the size of the regional government and *intergovernmental revenue* had an effect on the financial performance of the local government, while the regional expenditure and leverage had no effect on the financial performance of the regional government.

**Keywords :** local government financial performance, local government size, *intergovernmental revenue*, regional expenditure, leverage

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah

disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pada kenyataannya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah pusat belum dapat berjalan dengan baik karena masih banyak terjadi kesenjangan antara daerah di Indonesia (Adi,2005). Oleh karena itu pemerintah daerah harus menyelenggarakan pemerintahannya agar tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Sistem evaluasi, monitoring, dan pengukuran kinerja yang sistematis guna mengukur kemajuan yang dicapai pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu juga perlu diterapkan.

Pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah adalah dengan mengukur kinerja keuangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas.

Masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang muncul karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas publik yang diberikan oleh pemerintah daerah serta timbulnya ketidak yakinan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selama ini penelitian yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah sudah banyak dilakukan dan sampai saat ini masih menarik untuk diteliti, sebab penelitian- penelitian yang dilakukan sebelumnya memiliki hasil empiris yang berbeda-beda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan akan menghasilkan temuan yang lebih relevan dan representative atas pengaruh ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue, belanja daerah, dan leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **2. METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menguji pengaruh variabel independen yaitu Ukuran Pemerintah Daerah (*Size*), *Intergovernmental Revenue*,

Belanja Daerah, *Leverage* terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2016. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Yaitu dimana penulis ingin melihat pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil

##### 3.1.1 Statistik Deskriptif

Analisis data deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dari penelitian yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Analisis ini menjelaskan dan menggambarkan variabel dependen yaitu kinerja keuangan beserta variabel independen yaitu Ukuran Pemerintah Daerah (*size*), *intergovernmental revenue*, Belanja Daerah dan *Leverage*.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	<i>minimum</i>	Maximum	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
<i>KK</i>	65	2,8659000	3,4969000	3,200240000	0,1220648916
<i>SIZE</i>	65	1,6183259	28,7931402	3,743680291	4,1922159285
<i>IRV</i>	65	0,5016426	0,8930879	0,805448883	0,0663438922
BD	65	0,7358609	958,8432831	79,903949302	248,3491255216
LEV	65	0,0007001	0,4736244	0,015312591	0,0584189167

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Dari hasil analisis deskriptif pada tabel 1. maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- 1) Variabel dependen yaitu kinerja keuangan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,200240000 hal ini berarti bahwa rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sangat baik karena dalam kriteria penilaian sangat tinggi, pemerintah daerah yang memiliki kinerja keuangan pemerintah daerah yang paling tinggi yaitu kabupaten kudus tahun 2016 dengan nilai

maksimum 3,4969000, sedangkan pemerintah daerah yang memiliki kinerja keuangan terendah yaitu kota tegal tahun 2015 dengan nilai minimum 2,8659000, sedangkan nilai standar deviasi menunjukkan nilai nominal sebesar 0,1220648916

- 2) variabel ukuran pemerintah daerah (*size*) diukur menggunakan total aset yang memiliki nilai rata-rata sebesar 3,743680291. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki jumlah aset terbesar yaitu Kota Semarang tahun 2016 dengan nilai maksimum 28,7931402, sedangkan pemerintah daerah yang memiliki jumlah aset terendah yaitu kabupaten wonosobo tahun 2015 dengan nilai minimum 1,6183259, sedangkan nilai deviasi standar menunjukkan nilai nominal sebesar 4,1922159285.
- 3) Variabel *intergovernmental revenue* diukur dengan menggunakan rumus pendapatan transfer dibandingkan dengan total pendapatan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,805448883. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki dana transfer terbesar adalah kabupaten banjarnegara dengan nilai maksimum 0,8930879, sedangkan yang memiliki dana transfer terkecil adalah Kota Semarang tahun 2015 dengan nilai minimum 0,5016426, sedangkan standar deviasi menunjukkan nilai nominal 0,0663438922.
- 4) Variabel Belanja Daerah diukur dengan menggunakan total belanja daerah memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 79,903949302. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memiliki belanja daerah yang memiliki belanja daerah terbesar adalah Kota Tegal tahun 2015 dengan nilai maksimum 958,8432831, sedangkan belanja daerah terkecil adalah Kota Magelang tahun 2015 dengan nilai minimum 0,7358609, sedangkan standar deviasi menunjukkan nilai nominal 248,3491255216.
- 5) Variabel *Leverage* diukur dengan menggunakan rumus total utang dibandingkan dengan total aset memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,015312591. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memiliki utang terbesar adalah Kabupaten Wonogiri tahun 2015 dengan nilai maksimum 0,4736244, sedangkan utang terkecil adalah Kota Magelang tahun 2015



dengan nilai minimum 0,0007001, sedangkan standar deviasi menunjukkan nilai nominal 0,0584189167.

### 3.1.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorof Smirnov Test*

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,754
Asymp.Sig.(2-Tailed)	0,621

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Tabel 2. Menunjukkan bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,754 dengan nilai *Asymp.Sig.* (2-tailed) sebesar 0,621 atau 62,1% hal ini menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal, karena lebih dari 0,05 atau 5%.

### 3.1.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat adanya korelasi yang tinggi antara variabel bebas (independen). Hasil pengujian multikolinearitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
SIZE	0,537	1,862	Tidak Terjadi Multikolineritas
IRV	0,508	1,968	Tidak Terjadi Multikolineritas
BD	0,813	1,230	Tidak Terjadi Multikolineritas
LEV	0,988	1,012	Tidak Terjadi Multikolineritas

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

hasil uji multikolinearitas pada tabel IV.4 diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat satu variabel independen yang memiliki nilai VIF yang lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance* yang memiliki nilai dibawah 0,10, hal ini berarti bahwa model regresi terbebas dari adanya korelasi yang tinggi antara variabel independen sehingga kesimpulannya adalah model terbebas dari multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

#### 3.1.4 Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain hasil pengujian heterokedastisitas menggunakan uji gletser.

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
SIZE	0,570	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
IRV	0,595	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
BD	0,343	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
LEV	0,213	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Dari hasil perhitungan tersebut semua variabel independen memiliki nilai protabilitas lebih dari 0,05 yang berarti tidak terjadi heterokedastisitas.

#### 3.1.5 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi nertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam pengujian ini digunakan uji Durbin Watson (DW).Apabila nilai DW antara -2 sampai 2 berarti tidak terjadi autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Durbin Watson ditunjukkan dalam tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Keterangan	Durbin-Watson	Keterangan
Kinerja Keuangan	2,129	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Berdasarkan nilai *Durbin Watson* pada tabel 5. menunjukkan nilai 2,129 berarti angka *DW* berada diantara -2 sampai +2 berarti model regresi tidak menunjukkan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan pengganggu pada periode t-1 sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari autokorelasi.

### 3.1.6 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen. Perhitungan model regresi linear berganda dilakukan dengan bantuan SPSS 21.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Coefficients	T	Sig.	Keterangan
(constant)	2,445	10,132	0,000	
SIZE	0,016	3,588	0,001	Signifikan
IRV	0,878	3,101	0,003	Signifikan
BD	-5,584E-005	-,935	0,354	Tidak Signifikan
LEV	-0,393	-1,707	0,093	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Analisis Data, 2019

$$KK = 2,445 + 0,016SIZE + 0,878IRV - 5,584BD - 0,393LEV + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta sebesar 2,445 berarti jika ukuran pemerintah daerah (size), intergovernmental revenue, belanja daerah dan leveragesama dengan nol, maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.
- 2) Koefisien regresi variabel ukuran pemerintah daerah (size) menunjukkan nilai positif sebesar 0,016 berarti apabila variabel ukuran pemerintah daerah (size) naik sebesar 1 persen dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan diikuti penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,016.
- 3) Koefisien regresi intergovernmental revenue menunjukkan nilai positif sebesar 0,878 berarti apabila variabel intergovernmental revenue naik sebesar 1 persen dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan diikuti penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,878.
- 4) Koefisien regresi Belanja Daerah menunjukkan nilai negatif sebesar 5,584 berarti jika apabila variabel belanja daerah turun sebesar 1 persen dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan diikuti kenaikan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 5,584.
- 5) Koefisien regresi leverage menunjukkan nilai negatif sebesar 0,393 berarti jika apabila variabel leverage turun sebesar 1 persen dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan diikuti kenaikan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,393

### 3.1.7 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Didalam penelitian ini menggunakan nilai Adjusted  $R^2$  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1 dan 0. Jika hasil  $R^2$  mendekati 1 maka hasil tersebut mengindikasikan korelasi yang kuat. Namun jika hasil  $R^2$  mendekati 0 maka hasil tersebut mengindikasikan korelasi yang lemah

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,279	0,231	0,1070566752

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Koefisien deteminasi (Adjusted R<sup>2</sup>) dalam tabel 7. menunjukkan nilai sebesar 0,231 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu Ukuran Pemerintah Daerah (*size*), *intergovernmental revenue*, Belanja Daerah dan *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 23,1% kemudian sisanya 76,9 % dipengaruhi oleh faktor lain diluar variable yang diteliti.

### 3.1.8 Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji F

F <sup>hitung</sup>	F <sup>tabel</sup>	Sig.	Keterangan
5,801	2,53	0,001 <sup>b</sup>	Berpengaruh Simultan

Sumber: Hasil Analisis Data, 2019

Hasil dari uji F dalam tabel 8. menyebutkan bahwa nilai F hitung > F tabel yaitu 5,801 > 2,53 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah (*size*), *intergovernmental revenue*, belanja daerah, *leverage* telah menunjukkan model yang tepat.

### 3.2.3 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria yang ditetapkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis dapat diterima

Tabel 9. hasil Uji t

Variabel	t <sup>hitung</sup>	Sig.	Keterangan
Ukuran pemda ( <i>size</i> )	3,588	0,001	H <sub>1</sub> diterima
<i>Intergovernmental revenue</i>	3,101	0,003	H <sub>2</sub> diterima

Belanja daerah	-,935	0,354	H <sub>3</sub> ditolak
<i>Leverage</i>	-1,707	0,093	H <sub>4</sub> ditolak

Sumber: Hasil Analisis Data, 2019

Berdasarkan tabel 9. didapatkan hasil sebagai berikut :

Nilai signifikansi ukuran pemerintah daerah (*size*) menunjukkan nilai 0,001 yang berarti ukuran pemerintah daerah (*size*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena nilai signifikansi variabel ukuran pemerintah daerah (*size*) sebesar 0,005 dinyatakan lebih kecil dari kriteria yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan H<sub>1</sub> diterima.

Nilai signifikansi *Intergovernmental revenue* menunjukkan nilai 0,003 yang berarti *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena nilai signifikansi variabel *intergovernmental revenue* sebesar 0,013 dinyatakan lebih kecil dari kriteria yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan H<sub>2</sub> diterima.

Nilai signifikansi Belanja Daerah menunjukkan nilai 0,354 yang berarti belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena nilai signifikansi variabel belanja daerah lebih besar dari kriteria yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan H<sub>3</sub> ditolak.

Nilai signifikansi *leverage* menunjukkan nilai 0,093 yang berarti *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena nilai signifikansi variabel *leverage* lebih besar dari kriteria yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan H<sub>4</sub> ditolak.

### 3.2 Pembahasan

#### 3.2.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah (*size*) Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012), Aziz (2016), Sari (2016) dan Mulyani dan Wibowo (2017) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah (*size*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan total aset daerah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa besarnya total aset mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Aset yang dimiliki suatu daerah dapat memberikan kemudahan dalam kegiatan operasional untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan transportasi umum. Pelayanan yang ditujukan masyarakat diberikan dengan baik menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang baik sehingga kinerja keuangannya juga baik. Aset yang banyak memiliki tuntutan yang lebih besar, sehingga dalam melaporkan pengungkapan wajib kepada publik, pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan pengelolaannya.

### 3.2.2 Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sesotyaningtyas (2012) Laila, Herawati dan Ethika (2016). *Intergovernmental revenue* digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat terlaksana pelayanan kepada masyarakat atau bisa disebut dengan dana perimbangan. Semakin tinggi dana transfer yang didapatkan, maka dapat membantu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Apabila suatu daerah mendapatkan dana transfer yang besar dari pemerintah pusat maupun pemerintah lainnya, maka semakin besar juga tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya.

### 3.2.3 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugroho dan Prasetyo (2018). Belanja daerah merupakan pengeluaran anggaran daerah yang dianggarkan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Pada tahun 2015 total belanja daerah menunjukkan presentase sebesar 49,72% belanja operasional, belanja modal 14,11%, belanja tidak terduga 0,07, dan belanja transfer 36,10%, dan pada tahun 2016 total belanja daerah menunjukkan presentase sebesar 53,45%, belanja modal 14,55%, belanja tidak terduga 0,03%,

dan belanja transfer 31,98%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pengeluaran anggaran belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja yang sifatnya rutin. Belanja rutin tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk penentuan kinerja keuangan karena termasuk anggaran yang sudah pasti dan sifatnya tetap. Sehingga belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### 3.2.4 Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan

penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sesotyaningtyas (2012) dan bertolakbelakang dengan penelitian Kusumawardani (2012) dan Sari (2016). *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki dana internal yang kuat untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Sehingga tidak bergantung pada pinjaman atau hutang dari pihak eksternal. Selain itu Pemerintah daerah memiliki alternatif lain selain utang karena pemerintah daerah mendapatkan dana bantuan dari pemerintah pusat.

## **4.PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran pemerintah daerah dan intergovernmental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan belanja daerah dan leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

### **4.2 Saran**

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menambah tahun periode pengamatan, dengan cara memilih periode yang sekiranya bisa representatif dalam menjelaskan kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah.



- 2) Memperluas objek penelitian, dengan cara menambah sampel penelitian dari kabupaten maupun kota yang berada di provinsi lain.
- 3) Menambah variabel yang ada dengan variabel yang lain agar hasilnya dapat menggambarkan kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2005, Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang
- Aziz.,Asmaul.2016. pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Vol.XI No.1, ISSN: 1907-7513
- Kusumawardani,Media.2012. Pengaruh size, kemakmuran,ukuran legislatif, leverage, terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di indonesia. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi.ISSN: 2252-6765.
- Laila *et al.*2016. pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta.
- Lukman dan Bawono. 2019. Pengaruh karakterisitk pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemeintah daerah kabupaten/kota (studi empiris pada kabupaten/kota sepulau jawa tahun 2015-2016).
- Mulyani dan Wibowo.2017. pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan. Vol.XV No.1. Maret 2017
- Nugroho dan Prasetyo.2018. pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di jawa timur. p-ISSN- 2302-6251 e-ISSN: 2477-4995 E jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol.7 No.1. Hal 27-34. April 2018

Sari, Indah puspa. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal ekonomi Vol.3 No.1.

Sesotyoningtyas, Mirna. 2012. pengaruh leverage, ukuran legislatif intergovernmental revenue, dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi. ISSN: 2252-6765.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.